

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM:
KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA**

YOGYAKARTA, 05 DESEMBER 2012



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN
*CALL FOR PAPER***

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM:
KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA**

YOGYAKARTA, 05 DESEMBER 2012

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN
CALL FOR PAPER**

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM:
KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA**

Cetakan Tahun 2012

Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Prosiding Seminar Nasional dan *Call For Paper*

Pengentasan Kemiskinan Melalui UMKM: Komparasi Model Indonesia dan Malaysia

xii, 387 hlm; 21 x 29.7 cm.

ISBN 978-602-9018-66-0

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA

REVIEWER CALL FOR PAPER PADA SEMINAR NASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM : KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA

1. Prof DR. Andreas Lako, M.Si
Universitas Soegijapranata Semarang (Akuntansi)
2. DR. Ayi Ahadiat, MBA
Unila, Lampung (Manajemen)
3. DR. Rudi Badrudin, MSi
STIE YKPN, Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
4. DR. I Ketut Nama, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
5. DR. Sabihaini, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Manajemen)
6. DR. Sri Suharsih, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
7. Drs. Y. Sri Susilo, MSi
UAJY Yogyakarta (Ilmu Ekonomi)
8. Dian Indri, SE, MSi
UPN "Veteran" Yogyakarta (Akuntansi)

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak pernah kunjung selesai. Berbagai upaya baik berupa program bantuan maupun pemberdayaan masyarakat telah dilakukan pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain tetapi kemiskinan tetap saja terjadi. Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok pemerintah dengan mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan.

Secara umum kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan seseorang atau suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan terjadi antara lain akibat sulitnya memperoleh akses terhadap pekerjaan, rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat upah, ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama. Keseluruhan faktor tersebut membentuk lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*).

Lingkaran setan kemiskinan terjadi akibat serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi sehingga menyebabkan suatu negara atau masyarakat tetap miskin dan sulit untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih maju. Salah satu unsur lingkaran setan kemiskinan adalah hambatan terciptanya pembentukan modal. Produktivitas yang rendah diikuti dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menabung berdampak pada rendahnya pembentukan modal. Masyarakat mengalami kekurangan barang modal sehingga produktivitas juga tetap rendah.

Di samping dengan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat, salah satu cara untuk menanggulangi lingkaran setan kemiskinan adalah dengan cara pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ujud pemberdayaan ini tentu tidak hanya berupa pemberian bantuan modal saja, tetapi juga bantuan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku UMKM guna meningkatkan ketrampilan (*skill*) dan produktivitas UMKM. Untuk itu perlu dianalisis hubungan antara pertumbuhan UMKM dengan angka kemiskinan serta peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan.

Melalui seminar nasional ini dilakukan identifikasi langkah-langkah kebijakan guna mengembangkan UMKM dalam rangka mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, dalam upaya pengurangan kemiskinan, kita perlu mencermati dan berbagi pengalaman dengan negara tetangga kita salah satunya Malaysia. Dengan melakukan komparasi model antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan masing-masing negara dapat membangun model baru yang lebih baik sehingga upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Dalam seminar nasional ini panitia telah menerima lebih dari 30 artikel dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Setelah melalui beberapa *review*, maka akan dipresentasikan sejumlah 12 artikel. Selanjutnya dengan selesainya buku prosiding ini panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini bermanfaat. Terima kasih.

Yogyakarta, 05 Desember 2012

Ketua Panitia,

ttd.

Dr. Joko Susanto, M.Si

**SAMBUTAN DEKAN UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
PADA SEMINAR NASIONAL
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM :
KOMPARASI MODEL INDONESIA DAN MALAYSIA
YOGYAKARTA, 05 DESEMBER 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Saya Hormati:

- Bpk Dean of Social Sciences Universiti Sains Malaysia
- Bpk/Ibu Pembicara Seminar Nasional
- Bpk Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta
- Bpk/Ibu Wakil Rektor di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
- Bpk/Ibu Dekan di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
- Bpk/Ibu Ketua Jurusan di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
- Bpk/Ibu dan Saudara peserta seminar yang berbahagia

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan) Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta dengan tema "PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM: KOMPARASI MODEL INDONESIA & MALAYSIA".

Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan peserta seminar yang telah meluangkan waktu untuk datang ditempat ini dalam acara Seminar Nasional. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersusah payah dan membantu untuk menyiapkan dan bekerja keras sehingga Semina Nasional ini dapat terselenggara dengan baik.

Bpk, Ibu, saudara peserta seminar yang berbahagia,

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang harus kita pecahkan bersama, karena kemiskinan menyangkut aspek sandang, pangan, papan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan individu maupun keluarga. Pemerintah sendiri mentargetkan bahwa diakhir tahun 2012 tingkat kemiskinan Nasional menjadi 11,5 persen, hal ini harus kita dukung bersama dan perlu kerja sama yang baik dengan beberapa pihak termasuk para Akademisi, UMKM, Lembaga Keuangan dan lain-lain. Memang pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melalui beberapa program yang telah dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan.

Bpk, Ibu, saudara peserta seminar yang saya banggakan,

Perhatian pemerintah lewat beberapa program tersebut memang sudah banyak, namun masih ada kendala dan masih kurang berhasil, maka lewat Seminar Nasional ini diharapkan akan muncul ide-ide dan peluang-peluang baru baik dari pembicara maupun dari peserta seminar. UMKM salah satu usaha yang saat ini kita pandang sebagai usaha yang banyak melibatkan sumber daya manusia, maka sudahlah tepat jika peran dan partisipasinya ditingkatkan untuk ikut menanggulangi dan mengurangi kemiskinan lewat model atau program sesuai kemampuan UMKM tersebut.

Akhirnya, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengurangi dan menanggulangi kemiskinan dan mendukung program pemerintah yang sudah berjalan dan mengembangkan ide dan program-program baru. Kiranya sambutan saya cukup sekian, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada

para pemateri dan peserta Seminar Nasional serta semua pihak, dan apabila dalam pelaksanaan
kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 05 Desember
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Sujatmika, M.S

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Sambutan Dekan UPN "Veteran" Yogyakarta	vii
TOPIK 1. EKONOMI PEMBAGUNAN	
Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan <i>One Village One Product</i> untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Rudy Badrudin.....	3
Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Akhmad Syari'udin, Hendri Gusaptono, dan Listya Endang Artiani	27
Ekonomi Biaya Tinggi dan Problem Struktural UKM di Era Otonomi Daerah I Ketut Nama.....	41
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : Permasalahan, Peran dalam Perekonomian, Serta Pengembangannya Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Wahyu Dwi Artaningtyas	47
Insentif Fiskal Di Bidang Kepabeanaan Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm I Made Rai Natawidnyana.....	57
Analisis Investasi pada Industri Kreatif, Pendidikan dan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Akhmad Syari'udin dan Rini Dwi Astuti	67
Hubungan Supervisi Pimpinan Terhadap Kepuasan dan Kinerja Karyawan UMKM di Sleman Supeni Endahjati dan Teguh Erawati.....	83
Solusi Penanggulangan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Sujatmika.....	91
Membangun Jejaring UMKM Melalui Kemitraan Kasus di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Teguh Kismantoroadji.....	97

Problematika Inovasi UMKM Olahan Pisang Kalurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Indah Widowati103

Analisis Struktur Usaha Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan.....109

TOPIK 2. AKUNTANSI

Menggugat Politik Ekonomi Pertanian Petani vs Korporasi Vaisal Amir dan Aji Dedi Mulawarman.....117

Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Kunti Sunaryo, Dwi Sudaryati dan Jesy Kristy.....133

Struktur Kepemilikan Multidimensi dalam Kaitannya dengan Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Riil Dilihat dari Perspektif Siklus Hidup Perusahaan Sri Hastuti dan Sriyono.....145

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Corporate Social Responsibility dengan Nilai Perusahaan Indra Kusumawardhani dan Gentur Sukma Dani.....161

Hubungan Price To Book Value, Price To Earning Ratio, dan Bid-Ask Spread dengan Stock Split dan Implikasinya Terhadap Economic Value Added Hiras Pasaribu dan Wina Marliatunnisya171

Meninjau Sistem Good Corporate Governance dan Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Sektor Riil Kaharudinsyah Leon Sakti191

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Hubungan Antara Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan Lita Yulita Fitriyani, Noto Pamungkas dan Hanny Nurida203

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Sri Wahyuni Widiastuti, Sri Luna Murdianingrum dan Ornella Ari Trisnawati219

Corporate Social Responsibility : Sebuah Pandangan dari Sudut Islam Januar Eko Prasetyo dan Sabihaini.....233

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba Teguh Erawati dan Supeni Endahjati.....243

TOPIK 3. MANAJEMEN

Pengaruh <i>Resource Based View</i> dan <i>Market Based View</i> Terhadap <i>Competitive Advantage</i> UKM di Purwokerto (Studi Kasus Rumah Makan) Haryadi Sarjono, Sevenpri Candra dan Winda Juliantita	253
Protes Konsumen: Sebuah Ulas Balik dan Agenda Penelitian Ke Depan Kresno Agus Hendarto	267
Dampak Pengumuman <i>Bond Rating</i> Terhadap <i>Return</i> Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Khoirul Hikmah dan Yuyun Mawanti	295
Metode <i>Forecasting</i> dengan Pendekatan Program Minitab Lim Sanny dan Haryadi Sarjono	313
Faktor Demografi, Sosial Ekonomi dengan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Nany Noor Kurniyati	323
Analisis Peran Implementasi <i>Tacit Knowledge</i> Pada Inovasi Produk UKM Berwawasan <i>Green Industry</i> untuk Meraih Keunggulan Bersaing (<i>Survei</i> Pada UKM Kerajinan Anyaman Bambu di Punthuk, Dlingo, Bantul) Pribadi Widyatmojo, Sugiyanto dan Karyono.....	335
Pengaruh Struktur Organisasi dan Komunikasi Terhadap Implementasi Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada Industri Kulit di Yogyakarta Abdul Ghofar	347
Kegiatan dan Model Perencanaan Usaha Sri Kussujaniatun	357
<i>Work-Life Balance</i> : Konsep, Relevansi dan Konsekuensi pada Pekerja Perempuan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tri Mardiana	365
Sekilas Perilaku Masyarakat Entikong (Perbatasan Indonesia-Malaysia) dalam Menghadapi Bisnis Global Istiana Rahatmawati dan Purbudi Wahyuni	375
Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Kompetensi Entrepreneur Sutoyo	383

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) : PERMASALAHAN, PERAN DALAM PEREKONOMIAN, SERTA PENGEMBANGANNYA MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN

Wahyu Dwi Artaningtyas

ABSTRACT

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has played a very important role in the economic development of Indonesia. It has a significantly contribution in Gross Domestic Product (GDP), and employment. There are many problems faced by MSMEs such as inadequate credit assistance, skilled manpower, irregular supply of raw material, and absence of organized marketing. Inadequate credit assistance is the most serious problems among of those. Kredit Usaha Rakyat (KUR) is a programme given by the government to solve it. The objective of this programme is to enhance the productivity, efficiency and competitiveness of the MSMEs. Finally, the income of the labor at MSMEs will rise, that the way of MSMEs in reducing poverty.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh semua negara di dunia ini pada dasarnya mempunyai tiga nilai inti yaitu: *sustenance*, *self esteem* dan *freedom* (Todaro: 2004). *Sustenance* yang berarti kecukupan mengindikasikan bagaimana proses pembangunan tersebut membawa dampak terhadap terpenuhinya kebutuhan bagi warga negaranya, dalam hal ini terutama adalah tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Apabila dalam negara tersebut masih terdapat warga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimumnya, dapat dikatakan bahwa terdapat kemiskinan di negara tersebut. Hal lain yang tentu saja erat kaitannya dengan *sustenance* adalah *self esteem*, yang mengacu pada bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan harkat dan martabatnya, sesuai dengan jati dirinya. Bagaimana seseorang dapat mengaktualisasikan diri secara optimal apabila ia masih terbelenggu dalam kemiskinan. Lantas bagaimana pula mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin tersebut kita berdayakan (*empowerment*) sedemikian rupa sehingga mereka terentaskan dari kemiskinan.

Indonesia sebagaimana negara-negara lain di dunia ini, juga dihadapkan pada masalah kemiskinan yang serius dalam proses pembangunannya. Kemiskinan merupakan masalah klasik dan bersifat multidimensional, dimana dalam upaya pemecahannya tidak hanya membutuhkan strategi yang berskala nasional tapi terkadang juga harus dikaitkan dengan kebijakan internasional. Tentu saja masih tetap berpegang pada nilai inti pembangunan yang ketiga yaitu *freedom*, dimana walaupun kita terikat pada kesepakatan-kesepakatan bersama, akan tetapi tidak berarti mengekang dan membelenggu kebebasan kita dalam menentukan arah dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Deklarasi *Millenium of Development Goals* (MDGs), maka Indonesia mempunyai komitmen guna mewujudkan program-program yang tertuang di dalam MDGs tersebut. Kaitannya dengan program pertama dalam MDGs yaitu berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan berat dari muka bumi, maka implementasi dari komitmen bangsa Indonesia tersebut antara lain tertuang dalam berbagai kebijakan dan produk-produk hukum.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, pasal 1 disebutkan bahwa : Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga telah menargetkan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan absolut dari 14,1% pada tahun 2009, menjadi 8-10% pada tahun 2014. Hal ini termasuk dalam prioritas keempat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia tahun 2003- 2011(Maret)

Tahun	Kota (Juta Jiwa)	Desa (Juta Jiwa)	Kota dan Desa (Juta Jiwa)	Kota (%)	Desa (%)	Kota dan Desa (%)
2003	12,2	25,10	37,3	13,57	20,23	17,42
2004	11,4	24,80	36,1	12,13	20,11	16,88
2005	12,4	22,7	35,1	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,3	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional : [www.scribd.com/Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia](http://www.scribd.com/Perkembangan-Tingkat-Kemiskinan-di-Indonesia)

Dari tabel 1, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian secara absolut jumlahnya masih sangat besar. Terlebih bila kita cermati jumlah penduduk miskin yang tinggal di desa selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk miskin yang berada di perkotaan, baik, dalam jumlah absolut maupun dalam prosentasenya. Angka kemiskinan dari tahun 2003 terus menurun dan mencapai 35,1 juta orang (15,97 persen dari total penduduk) pada tahun 2005.

Pada tahun 2006, angka kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 17,75% hal ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak pada tahun 2005 yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar. Sampai dengan bulan Maret 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen), yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak sekitar 1 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.

Berbagai strategi dan kebijakan telah dirumuskan guna menanggulangi kemiskinan di Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, yang meliputi

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Terkait dengan ke empat strategi tersebut, makalah ini lebih memfokuskan pada strategi kedua dan ketiga yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan pendapatan kaum miskin serta bagaimana upaya menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Hal ini erat kaitannya pula dengan lebih banyaknya penduduk desa yang miskin apabila dibandingkan dengan penduduk kota baik secara jumlah maupun dalam prosentase. Dan juga mengingat banyaknya UMKM yang berada di daerah pedesaan.

2. DEFINISI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Sebuah usaha dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebanyak 5-19 orang, menurut Biro Pusat Statistik disebut sebagai usaha kecil, dan apabila jumlah pekerjanya 20- 99 orang maka dikategorikan sebagai usaha menengah. Sementara itu Bank Indonesia mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki oleh keluarga, sumber daya yang digunakan bersifat lokal serta lapangan usahanya bersifat mudah exit dan entry. Sementara itu Bank Dunia mendefinisikan Usaha kecil sebagai suatu usaha

dengan jumlah karyawan kurang dari 30 orang , pendapatan dalam setahun kurang dari \$ 3 juta, serta jumlah asset kurang dari \$3 juta.

Kementerian Koperasi dan UKM mendefinisikan sebuah usaha sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih (selain tanah dan bangunan) yang dimiliki lebih dari Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 500juta. Sedangkan apabila kekayaan bersih yang dimiliki melebihi Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar dan omzet per tahunnya lebih dari Rp2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar , maka usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha menengah.

Tabel 2 . Definisi dan Ketentuan Kriteria UKM

Lembaga	Tipe Usaha	Kriteria
Bank Dunia	Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tenaga kerja <30 ❖ Omzet setahun <\$3 juta ❖ Asset <\$3juta
	Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tenaga kerja paling banyak 300 Orang ❖ Omzet setahun sampai dengan \$ 15 juta ❖ Asset mencapai \$15 juta
Bank Indonesia	Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dijalankan oleh rakyat miskin ❖ Dimiliki oleh keluarga ❖ Pemanfaatan sumber daya lokal ❖ Bersifat mudah untuk <i>entry</i> dan <i>exit</i>
	Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Asset < Rp 5 milyar untuk industri ❖ Asset < Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan ❖ Omzet dalam setahun, Rp 3 milyar.
Biro Pusat Statistik	Usaha Kecil	❖ Tenaga Kerja 5 sampai dengan 19 orang
	Usaha Menengah	❖ Tenaga Kerja 20 sampai dengan 99 orang
Kementerian Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nilai kekayaan bersih selain tanah dan bangunan antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta ❖ Omzet dalam setahun antara Rp 300 juta sampai dengan tertinggi Rp 2,5 milyar.
	Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nilai kekayaan selain tanah dan bangunan lebih dari Rp 500 juta sampai dengan tertinggi Rp 1 milyar. ❖ Omzet dalam setahun lebih dari Rp 2,5 milyar dan tertinggi Rp 50 milyar

Sumber : Bank Indonesia : <http://infoukm.wordpress.com>

3. PERAN PENTING DAN KEDUDUKAN UMKM

Pentingnya peran dan kedudukan UMKM dalam perekonomian Indonesia terlihat jelas dalam fungsinya sebagai berikut :

1. Sebagai penyedia lapangan kerja terbesar .
2. Kontribusinya dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
3. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
4. Sumber terciptanya inovasi

Peran tersebut sangat kentara pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi, dimana peran UMKM dalam PDB mengalami kenaikan dibandingkan sebelum terjadinya krisis, benamerosotnya usaha besar.

Tabel 3. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Skala Usaha Tahun 2009 -2010 Atas Dasar Konstan 2000

Jenis Usaha	Jumlah (milyar rupiah) 2009*	Jumlah (milyar rupiah) 2010**	Pertumbuhan Jumlah
Usaha Mikro	682.259,8	719.070,2	36.801,4
Usaha Kecil	224.311,0	239.111,4	14.800,4
Usaha Menengah	306.028,5	324.390,2	18.361,7
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.212.599,3	1.282.571,8	69.972,5
Usaha Besar	876.459,2	935.375,2	58.916,0
JUMLAH	2.089.058,5	2.217.947,0	128.888,5

Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UMKM (2011)

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3, terlihat bahwa usaha mikro memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap nilai apabila dibandingkan Usaha Kecil dan Menengah. Pada tahun 2009, Usaha Mikro memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 32,66 %, sementara apabila digabungkan dengan Usaha Kecil dan Menengah menjadi 58,05%, sedangkan usaha besar memberikan kontribusi sebesar 41,95%.

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja menurut Skala Usaha tahun 2009 - 2010

Jenis Usaha	2009*	2010**	Pertumbuhan	%
Usaha Mikro	90.012.694	93.014.759	3.002.065	3,34
Usaha Kecil	3.521.073	3.627.164	106.091	3,01
Usaha Menengah	2.677.565	2.759.852	82.287	3,07
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	96.211.332	99.401.775	3.190.443	3,32
Usaha Besar	2.674.671	2.839.711	165.040	6,17
JUMLAH	98.886.003	102.241.486	3.355.483	3,36

Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UMKM (2011)

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dari tabel 4, terlihat bahwa UMKM di tahun 2009 ternyata mampu menyerap hampir 97,29% tenaga kerja, sementara jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha besar hanya sekitar 2,71%. Walaupun demikian apabila dilihat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di dua skala usaha tersebut, secara relatif penyerapan tenaga kerja pada usaha besar tumbuh lebih tinggi, akan tetapi secara jumlah absolut pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap di UMKM jauh melebihi pertambahan jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha besar. Hal ini mengisyaratkan bahwa UMKM di Indonesia juga sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja terutama bagi masyarakat miskin.

Dari tabel 3 dan 4 ada satu hal yang menarik yaitu bahwasannya walaupun terdapat selisih yang sangat besar dalam jumlah tenaga kerja yang terserap di UMKM, apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di usaha besar, namun kontribusi terhadap PDB tidak jauh berbeda, walaupun masih besar sumbang dari UMKM. Lantas dimana letak permasalahannya? Jawabannya adalah tidak lain terletak pada masalah produktivitas setiap skala usaha tersebut. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di UMKM jauh lebih rendah dari tenaga kerja di usaha besar, sehingga nilai tambah (Value Added) yang

diberikan tidak sebesar jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha tersebut. Kiranya perlu dikaji lebih lanjut apa yang menjadi penyebabnya, dan hal ini membutuhkan suatu kebijakan yang tepat.

Kebijakan yang terarah pada pemberdayaan UMKM menjadi sangat krusial, terlebih dalam bentuk kebijakan difokuskan pada meningkatnya produktivitas serta daya saling dan upaya penumbuhkembangan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Klan, K). Diharapkan melalui pemberdayaan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Kemendag, 2004)

4. PERMASALAHAN DALAM UMKM

Mengingat pentingnya peran dan kedudukan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian di negara kita, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk terus mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM. Bagaimana dan apa saja langkah konkrit yang harus ditempuh oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti :

1. Sistem dan mekanisme pembiayaan usaha, permodalan baik yang bersifat formal maupun semiformal, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh UMKM karena terkendala akses serta pemenuhan persyaratan *Character, Capital, Capacity of repayment, Condition* serta *Colateral*.
2. Pengadaan bahan baku serta pemasaran produk yang masih terbatas
3. Faktor sumberdaya manusia nya sendiri yang masih rendah, kaitannya dengan Inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Tabel 5. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM

Permasalahan	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Kesulitan Modal	34,55%	44,05%
Pengadaan bahan baku	20,14%	12,22%
Pemasaran	31,70%	34,00%
Masalah lain	13,60%	9,73%

Sumber : Robinson , 2000, World Bank

5. BAGAIMANA MENGATASI PERMASALAHAN UMKM

Terdapat beberapa strategi yang dapat dijalankan guna lebih memberdayakan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (Kuncoro Mudrajad, 2003)

1. Aspek managerial, yang meliputi : peningkatan produktivitas/omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumberdaya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit .
3. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-anak Angkat, PIR, *Forward Linkage, Backward Linkage*, modal ventura ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk Pemukiman Industri Kecil, Lingkungan Industri Kecil , sarana Usaha Industri Kecil.
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan (KOPINKRA).

Guna membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan aspek permodalan, maka Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rencana Tindak Jangka Jangka Panjang (2005-2009) telah melaksanakan Program Perkuatan KUMKM. Konsep dasar dari program ini adalah berupa pemberian kredit murah bagi masyarakat miskin, dimana persyaratan yang ditetapkan menggunakan pendekatan sektoral.

Hal ini sebagai alat untuk menghilangkan penghambat terbesar bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan pendapatannya yaitu tidak adanya akses ke lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Output yang diharapkan dari program Perkuatan ini adalah berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Selain itu, kita juga mengenal skim kredit pertanian yang bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 5 November 2007. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas kredit bagi para petani yang dikembangkan melalui kerjasama dengan beberapa bank nasional yang ditunjuk oleh pemerintah dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah serta suku bunga maksimum sebesar 14 persen untuk KUR Ritel dan 22 persen untuk KUR Mikro. Kredit Usaha Rakyat menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi angka kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja (Departemen Pertanian 2009).

UMKM yang termasuk dalam kategori usaha yang berhak menerima kucuran kredit adalah Usaha Kecil yang merupakan usaha produktif dan layak (*feasible*), namun belum *bankable*. Proyek yang dibiayai akan dijadikan sebagai agunan kredit sedangkan agunan tambahan sebagian di-cover oleh program penjaminan (PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo).

Tabel 6. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional (31 Agustus 2012)

NO	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR			Rata-rata Kredit (Rp juta/debitur)	NPL (%)
		Plafon (Rp juta)	Outstanding (Rp juta)	Debitur		
1	BNI	8.887.572	4.727.100	123.152	72,2	3,8
2	BRI (KUR Ritel)	11.433.848	5.000.755	73.344	155,9	3,8
3	BRI (KUR Mikro)	40.198.535	12.786.635	6.418.783	6,3	2,2
4	BANK MANDIRI	9.613.948	5.919.134	198.739	48,4	1,1
5	BTN	2.868.251	1.803.625	16.905	169,7	5,1
6	BUKOPIN	1.233.318	465.400	8.689	141,9	11,2
7	BANK SYARIAH MANDIRI	2.430.838	664.087	29.036	83,7	4,1
8	BNI SYARIAH	17.936	14.881	67	267,7	0,0
TOTAL		76.684.246	32.381.616	6.868.715	11,2	3,8

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2012)

Terdapat 7 bank nasional yang telah menyalurkan KUR yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Bank yang merupakan penyalur kredit terbesar adalah Bank BRI dengan total plafon mencapai Rp. 51,6 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafonnya sebesar Rp. 11,4 triliun dan Rp. 40,2 triliun, debiturnya 73.344 UMK dan 6.418.783 UMK, rata-rata kredit Rp. 155,9 juta/debitur dan Rp. 6,3 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,8% dan 2,2%. Sebagaimana kita ketahui BRI adalah bank yang lebih banyak menjangkau dan melayani nasabah yang berada di pedesaan., dimana kemiskinan banyak terdapat di wilayah tersebut. Adanya KUR semakin

membuka peluang bagi masyarakat desa baik itu petani maupun mereka yang bekerja di UMKM untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas mereka.

Hal lain yang kiranya perlu menjadi perhatian selain besaran kredit yang telah terealisasi diterimakan kepada para debitur adalah nilai dari *Non Performing Loan* (NPL) Bank BRI dengan NPL sebesar 3,8 untuk KUR ritel dan 2,2 % untuk KUR Mikro, dapat dikatakan masih dalam tahapan yang sehat. Hal ini menunjukkan adanya kesanggupan dari para debitur untuk mengembalikan pinjaman atau kredit mereka dengan lancar. Pengembalian kredit yang lancar ini tidak bisa terlepas dari kemampuan mereka dalam meningkatkan hasil usaha yang telah dibiayai dengan pinjaman yang berasal dari KUR tersebut. Bank dengan NPL tertinggi adalah Bank Bukopin yaitu sebesar 11,6%.

Tabel 7. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR BPD (31 Agustus 2012)

NO	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR				NPL (%)
		Plafon (Rp juta)	Outstanding (Rp juta)	Debitur	Rata-rata Kredit (Rp juta/debitur)	
1	BANK NAGARI	748.688	449.858	22.953	32,6	3,0
2	BANK DKI	215.803	159.327	1.765	122,3	5,4
3	BANK JABAR BANTEN	2.046.055	1.080.507	20.009	102,3	8,3
4	BANK JATENG	1.077.720	652.696	16.435	65,6	3,4
5	BPD DIY	59.493	33.537	630	94,4	3,9
6	BANK JATIM	3.062.031	1.889.591	28.774	106,4	8,5
7	BANK NTB	84.990	59.346	.189	71,5	2,1
8	BANK KALBAR	197.499	127.856	1.534	128,7	0,0
9	BANK KALTENG	111.224	68.613	2.454	45,3	3,5
10	BANK KALSEL	204.119	150.493	2.574	79,3	2,4
11	BANK SULUT	53.317	33.254	1.909	27,9	13,3
12	BANK MALUKU	93.757	52.381	.473	37,9	0,0
13	BANK PAPUA	121.013	87.488	1.519	79,7	3,9
14	BANK ACEH	5.751	5.639	60	-	-
15	BANK SUMUT	27.378	26.169	200	136,9	-
16	BANK RIAU KEPRI	9.470	9.007	69	137,2	-
17	BANK JAMBI	-	-	-	-	-
18	BANK SUMSEL BABEL	-	-	-	-	-
19	BANK BENGKULU	3.608	3.513	37	97,5	-
20	BANK LAMPUNG	16.644	15.845	201	82,8	-
21	BANK BPD BALI	33.420	31.372	398	84,0	-
22	BANK NTT	-	-	-	-	-
23	BANK KALTIM	63.798	59.873	722	88,4	-
24	BANK SULTENG	-	-	-	-	-
25	BANK SULTRA	8.419	7.908	82	102,7	-
26	BANK SULSELBAR	375	375	5	75,0	-
TOTAL		8.244.573	5.004.648	105.992	77,8	6,2
TOTAL BPD LAMA		8.075.710	4.844.946	104.218	77,5	6,4
TOTAL BPD BARU		168.863	159.701	1.774	95,2	

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2012)

Dari tabel 7, terlihat bahwa penyaluran KUR oleh BPD sampai dengan bulan Agustus 2012 telah mencapai Rp. 8,2 triliun dengan jumlah UMKMK sebesar 105.992. Rata-rata kredit yang diterima debitur sebesar Rp. 77,8 juta. Bank Jatim dan Bank Jabar Banten merupakan BPD yang menyalurkan KUR terbesar sekitar 3,1 triliun dan 2 triliun. Untuk di luar pulau Jawa, Bank Nagari dan Bank Kalbar merupakan Bank Pelaksana terbesar yang menyalurkan KUR masing-masing sebesar Rp. 748,7 miliar dan 197,5 miliar. Sampai bulan Agustus 2012 NPL yang terbentuk dari penyaluran KUR oleh BPD adalah sebesar 6,2%.

Secara nasional, sampai bulan Agustus 2012, dari tabel 3. di bawah ini terlihat bahwa dari target ditetapkan sebesar Rp. 30 triliun KUR sudah mencapai Rp. 21,6 triliun atau 714,9%. Diharapkan bulan yang tersisa di tahun 2012 ini - September sampai dengan Desember - Bank pelaksana dapat penyaluran KUR kepada UMKMK yang visible namun belum bankable (Kemenko Bid. Perekonomian). Apabila dilihat dari sisi sektor ekonomi, sektor perdagangan adalah sektor yang paling mendominasi penyaluran KUR, yaitu sekitar Rp. 49 triliun dengan jumlah debitur UMKMK sebesar 4,8 juta debitur. Itu diikuti oleh sektor pertanian dengan besaran kredit sebesar Rp. 13,6 triliun dan dengan jumlah debitur 951.504

Tabel 8. Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi (31 Agustus 2012)

NO	SEKTOR EKONOMI	TOTAL	
		Plafon (Rp juta)	Outstanding (Rp juta)
			Debitur
			951.504
1	Pertanian	13.576.839	6.721.055
2	Perikanan	770.601	419.760
3	Pertambangan	60.187	36.320
4	Industri pengolahan	2.200.288	1.217.532
5	Listrik, gas dan air	37.524	23.011
6	Konstruksi	1.588.431	763.912
7	Perdagangan	48.987.984	20.351.671
8	Penyediaan akomodasi	555.076	332.345
9	Transportasi	907.689	565.873
10	Perantara keuangan	665.168	354.232
11	usaha persewaan	2.375.554	1.369.413
12	Adm. Pemerintahan	8.621	1.920
13	Jasa pendidikan	34.380	21.036
14	Jasa kesehatan	163.073	93.634
15	Jasa kemasyarakatan	2.114.347	998.715
16	Jasa perorangan	44.450	26.216
17	Badan internasional	75	75
18	Lainnya	10.838.531	4.089.544
Total		84.928.819	37.386.264

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2012)

Berdasarkan kondisi tersebut maka akan lebih jelas arah serta sasaran dari peruntukan KUR sektor pertanian yang banyak digeluti oleh penduduk miskin di pedesaan dan sektor perdagangan yang membutuhkan uluran bantuan permodalan guna peningkatan usaha dan produktivitasnya.

KESIMPULAN

Besaran jumlah dana yang telah dikururkan tidak dengan begitu saja memberikan gambaran yang nyata pada kita tentang kemanfaatan dari program perkuatan UMKMK dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Banyak hal yang masih harus kita telusuri seperti apakah penerima kredit telah benar-benar tepat sasaran dalam artian apakah mereka benar benar telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan kredit tersebut. Apakah pemanfaatan kredit juga telah sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat penerima kredit, yang pada akhirnya akan berdampak bagi peningkatan pendapatan mereka, atau bahkan pada penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan pada gilirannya tentu saja adalah pada turunnya angka kemiskinan.

Akhirnya ketepatan sasaran, ketepatangunaan dari program Kredit Usaha Rakyat khususnya untuk pengembangan usaha produktif UMKMK akan menjadi kunci utama bagi usaha pengurangan jumlah penduduk

miskin. Meminjamkan uang pada kaum miskin bukan hanya membantu mereka, akan tetapi lebih pada bagaimana membangkitkan kesadaran mereka dan memberikan kesempatan pada mereka untuk seoptimal mungkin menggali segenap potensi yang ada pada diri dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Dennis (1982), " Small Industry in Developing Countries", World Development, November
- Departemen Pertanian. 2007. Kredit Usaha Rakyat (KUR).http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=563&Itemid=155 [10 Oktober 2010]
- Gie Kian,K (2008),"UMKM : Pilar Ekonomi Rakyat, Umat dan Bangsa", makalah dalam Latihan Kader III HMI Badko Sumatera Utara, 17-25 Oktober.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian , Komite Kredit Usaha Rakyat: www.komite-kur.com
- Kementrian Negara Koperasi dan UMKM, www.smecca.com/sme/KUR
- Kuncoro ,Mudrajad (2003), *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggito Abimanyu (1995), " Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era deregulasi dan Debirokratisasi", *Kelola (Gadjah mada University Business Review)*, no.10/IV/1995.
- Latifah,Emmy (2011)," Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang Berorientasi pada Millenium Development Goals", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 no.3 September
- Partomo , Titik Sartika (2004) ," Usaha Kecil Menengah dan Koperasi ", *Center for Industry and SME Studies ,faculty of Economics University of Trisakti Working Paper Series* no.9. Juni 2004.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Robinson,MS (2000), *The Microfinance revolution : Sustainable Finance for The Poor*, Washington DC, World Bank.
- Sjaifudin, Hetifah, Dedi Haryadi, Maspiyati (1995), *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, AKATIGA, Bandung.
- Sriyana,Jaka (2010)," Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : studi Kasus di kabupaten bantul", makalah dalam Simposium Nasional 2010 : Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif, Purworejo.
- Suarya,Wayan (2007)," Pemberdayaan Ekonomi rakyat Melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah", makalah dalam Konvensi Nasional Media Massa se Indonesia ,Samarinda, 8 Pebruari.
- Sumodiningrat, Gunawan (1994), " Tantangan dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil," *Jurnal Tahunan CIDES*, no. 1, 157-164.
- Todaro,P Michael, Smith c. Stephen (2004), *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Yunus Muhammad (1994), *Major Uses of Loan Funds*, Grameen Bank, Bangladesh.